PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

ERIN ALMUDI
NPM. 1802110153

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 12 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

ERIN ALMUDI
NPM : 1802110153

Dengan judul:

PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi Akuntansi	Pembimbing I	Pembimbing II
Zulkifli Umar, SE., M.Si., Ak.CA	**Dr. H. Aliamin, SE., M.Si., Ak.CA**	**Maidar, SE., M.Si**
NIK. 19711019 200405 1 001	**NIK. 19590217 199101 1 001**	**NIK. 19801231 200802 2 001**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 12 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

ERIN ALMUDI
NPM : 1802110153

Dengan judul:

PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 02 Agustus 2023

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Dr. H. Aliamin, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19590217 199101 1 001

Anggota

Maidar, SE., M.Si
NIK. 19801231 200802 2 001

Anggota

Cut Fitrika Syawalina, SE., M.Si
NIK. 19810823 201309 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

H. Zulkifli Umar, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU"

Banda Aceh,12 Agustus 2023

Yang Menyatakan

Erin Almudi

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Erin Almudi
NPM	: 1802110153
Program Studi	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right)*** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 12 Agustus 2023

Yang Menyatakan,

Erin Almudi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum WR.WB

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas segalah rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan sampai kepada kita semua. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue"**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis dalam menyempurnakan penulisan ini.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kesungguhan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Muliadinsyah dan Ibunda Erlia serta adik–adik yang telah memberikan doa, perhatian, kasih sayang, pengorbanan moral dan material yang tidak terkira.

2. Bapak Drs.Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammdiyah Aceh.
3. Ibu Hj.Nadiya, SE, M.Si., selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammdiyah Aceh.
4. Bapak H.Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammdiyah Aceh.
5. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si., selaku Ketua Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammdiyah Aceh.
6. Bapak Dr.H.Aliamin, SE, M.Si, Ak.CA., dan Ibu Maidar, SE, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dorongan dan arahan dari merencanakan hingga selesainya penelitian ini.
7. Kepada Rafiqah yang sama-sama sedang berjuang, yang telah memberikan dukungan, masukan serta membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Bunda Herliani dan suami yang telah mendukung, mengawasi dan mendorong agar penulis kuliah kembali serta memberikan motivasi sehingga penulis dapat berubah jauh lebih baik dari sebelumnya.
9. Kepada Didi Trianda dan Asmiyanto Bima Setia yang telah mendukung dan memberikan masukan sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat saya Agung Nurman yang telah memberikan dukungan dan doa dari jauh selaku teman seperjuangan dari SMP sampai sekarang.
11. Kepada Marsha Dinun, Armisi Jaya, Pak Dika yang telah mendukung agar skripsi ini cepat diselesaikan.

12. Dan kepada teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis selama ini. Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak

Wassalamu'alaikum wr.wb

Banda Aceh, 19 Juni 2023

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR LAMPIRAN ix
ABSTRAK x

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian 4
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 5
1.4.1 Kegunaan Praktis 5
1.4.2 Kegunaan Akademis 5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 6

BAB II KAJIAN PUSTAKA 7
2.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 7
2.1.1 Tolak Ukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 8
2.1.2 Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 8
2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah 10
2.2.1 Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 11
2.2.2 Prinsip – Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah 12
2.2.3 Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah 12
2.3 Pengawasan Internal ..... `13
2.3.1 Lingkup Pengawasan Internal 14
2.3.2 Fungsi Pengawasan Internal 15
2.3.3 Indikator Pengawasan Internal 16
2.4 Penelitian Sebelumnya 17
2.5 Kerangka Pemikiran 20
2.6 Hipotesis 21

BAB III METODE PENELITIAN 22
3.1 Desain Penelitian 22
3.2 Populasi dan Sampel 22
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 23
3.4 Definisi Operasional Variabel 24
3.4.1 Variabel *Dependent* 24
3.4.2 Variabel *Independent* 25
3.4.2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah 25
3.4.2.2 Pengawasan Internal 25
3.5 Teknik Analisis Data 27

3.5.1 Statistik Deskriptif 27
3.5.2 Regresi Linier Berganda 27
3.6 Pengujian Data 28
3.6.1 Pengujian Instrumen 28
3.6.1.1 Pengujiaan Validitas 29
3.6.1.2 Pengujian Reliabilitas 29
3.6.2 Pengujian Asumsi Klasik 30
3.6.2.1 Uji Normalitas 30
3.6.2.2 Pengujian Multikoliniearitas 31
3.6.2.3 Pengujian Heteroskedastisitas 31
3.6.2.4 Pengujian Autokorelasi 32
3.7 Pengujian Hipotesis 32
3.7.1 Pengujian Secara Simultan (Uji F) 32
3.7.2 Pengujian Secara Parsial (Uji T) 33

BAB IV HASIL PENELITIAN 34
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 34
4.2 Karakteristik Responden 35
4.2.1 Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 36
4.2.2 Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah 38
4.2.3 Variabel Pengawasan Internal 40
4.3 Satistik Deskriptif 41
4.4 Regresi Linier Berganda 42
4.5 Hasil Pengujian Data 44
4.5.1 Pengujian Validitas Instrumen 44
4.5.2 Uji Reliabilitas 45
4.5.3 Uji Normalitas 45
4.5.4 Uji Multikoliniearitas 46
4.5.5 Uji Heteroskedastisitas 47
4.5.6 Uji Autokorelasi 48
4.6 Hasil Pengujian Hipotesis 48
4.6.1 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 48
4.6.2 Hasil pengujian secara parsial (Uji T) 50
4.7 Pembahasan 51
4.7.1 Pengaruh pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal secara Simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 51
4.7.2 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah secara Parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .. 52
4.7.3 Pengaruh Pengawasan Internal secara Parsial terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 56
5.1 Kesimpulan 56
5.2 Saran 57

DAFTAR PUSTAKA 59

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 18
Tabel 3.1 Populasi dan Sampel 23
Tabel 3.2 Definisi dan Operasional Variabel 26
Tabel 4.1 Deskriptif Kuesioner 34
Tabel 4.2 Karakteristik Responden 35
Tabel 4.3 Penjelasan Responden terhadap Variabel Kinera keuangan Pemerintah Daerah 36
Tabel 4.4 Penjelasan Responden terhadap Variabel Pengelolaan keuangan Daerah 38
Tabel 4.5 Penjelasan Responden terhadap Variabel Pengawasan Internal 40
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif 42
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda 43
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Validitas Instrumen 44
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen 45
Tabel 4.10 Nilai VIF Variabel Bebas 46
Tabel 4.11 Hasil Pengujian Secara Simultan 49
Tabel 4.12 Koefisien Determinasi 49
Tabel 4.13 Hasil Pengujian Seacara Parsial (Uji T) 50

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran 21
Gambar 4.1 Hasil Pengujian Normalitas..... 46
Gambar 4.2 Hasil Pengujian heteroskedastisitas..... 47

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Daftar SKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022/2023	63
Lampiran 2	Kuesioner Penelitian.....	64
Lampiran 3	Tabel Tabulasi Data Kuesioner	68
Lampiran 4	Statistik Deskriptif.....	71
Lampiran 5	Hasil Regresi Linier Berganda	72
Lampiran 6	Tabel Distribusi Nilai T_{tabel} Alpha α=5%	74
Lampiran 7	Tabel Distribusi Nilai F_{hitung}	75

PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

ERIN ALMUDI
1802110153

Pembimbing I : Dr.H.Aliamin, SE, M.Si, Ak.CA.
Pembimbing II : Maidar, SE, M.Si.

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Simeulue. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 70 responden. Data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan satuan pengukuran skala likert. Teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data adalah regresi linier berganda dan untuk pengujian hipotesis digunakan uji-F dan uji-t dengan bantuan program SPSS versi 20. Hasil uji-F (simultan) dan uji-t (parsial) menunjukkan bahwa variabel yang diteliti yaitu pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue dengan nilai F_{hitung} sebesar 22,681 dan nilai F_{tabel} sebesar 3,13 dengan taraf signifikansi 0,000 pada tingkat signifikan 5%.

Kata kunci: ***Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengawasan Internal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.***

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara merupakan wilayah yang ditempati masyarakat dan memiliki suatu organisasi yang berfungsi untuk mengurus kepentingan–kepentingan negara. Organisasi tersebut merupakan suatu lembaga pemerintahan yang bersifat nirlaba. Lembaga pemerintah pada setiap negara memiliki peranan dalam meningkatkan pelayanan guna memfasilitasi kepentingan masyarakat yang secara tidak langsung memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang dicapai dengan cara mengelola keuangan pemerintah dengan baik (Antari & Sedana, 2018).

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan karena pemerintah pusat menerapkan kebijakan otonomi daerah dengan harapan bahwa pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola daerahnya. Diterapkannya kebijakan otonomi daerah disebabkan karena ketidakmampuan pemerintah pusat untuk mengurus keseluruhan pembangunan daerah, oleh karena itu pemerintah pusat melimpahkan wewenang dan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola secara mandiri seluruh kepentingan daerahnya (Sari & Mustanda, 2019). Kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan tingkat pencapaian dari hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan melalui kebijakan atau ketentuan perundang – undangan selama satu periode tertentu. Selama periode tersebut, pemerintah diharapkan mampu menghasilkan kinerja yang optimal dengan rancangan anggaran yang telah ditetapkan dan disahkan sebelumnya (Putri

& Darmayanti, 2019).

Faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah diantaranya yaitu pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik berorientasi pada kinerja yang terdapat keterkaitan antara sasaran dan strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang ingin dialokasikan maka dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan yang baik mempunyai pengaruh terhadap kinerja suatu instansi atau organisasi (Sartika, dkk, 2020). Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumberdaya yang handal, tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian, suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah (Rasdalima, 2018).

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah yaitu pengawasan internal. Pengawasan internal merupakan suatu sistem pengendalian manajemen, efesiensi, dan efektifitas pelaksanaan tugas. Pengawasan internal juga digunakan sebagai alat untuk membantu pimpinan lembaga atau instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pengawasan internal sangat penting dilakukan guna para pegawai dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar demi kenyamanan bersama dan tercapainya tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien (Khairiah & Safira, 2021).

Pelaksanaan otonomi daerah tidak selalu berdampak positif, otonomi daerah juga menyebabkan ketimpangan di daerah dan permasalahan lainnya seperti

ketidaksiapan pemerintah kabupaten/kota memenuhi harapan pemerintah pusat untuk dapat membiayai pembangunan daerahnya dengan Pendapatan Asli Daerah (Zamra & Ernawati, 2019). Seperti halnya pada Badan Pengawasan dan Pembangunan di Kabupaten Simeulue, Bupati Simeulue menyatakan bahwa rasa belum puas atas capaian kinerja keuangan, masih ada perbaikan atau koreksi dari pelaporan keuangan daerah terkait realisasi transfer ke daerah dan dana desa, realisasi APBD, opini laporan keuangan, kinerja pelaksanaan anggaran (Simeuluekab, 2021).

Fenomena lain yang terjadi pada tahun 2021 pemerintah pusat meluncurkan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp.519 milliar untuk Aceh. Dana ratusan milliar tersebut diberikan sebagai bentuk reward atau penghargaan bagi kabupaten/kota di Aceh, yang besarnya atau jumlah dananya bervariasi. Namun, tercatat ada tiga kabupaten yang gagal mendapatkan reward dari pemerintah pusat salah satunya yaitu Kabupaten Simeulue karena tidak mampu memenuhi beberapa persyaratan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Simeulue, Marlian menyebutkan, ada dua syarat utama pemerintah daerah memperoleh insentif DID, yaitu penyusunan APBD tepat waktu dan laporan keuangan yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sejak enam tahun terakhir baru kali ini Kabupaten Simeulue tidak mendapatkan dana DID yang disebabkan penyusunan APBD tidak tepat waktu (Redaksi, 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Simeulue belum optimal.

Pemerintah Kabupaten Simeulue menggandeng Badan Pengawasan Keuangan Provinsi (BPKP) Aceh untuk meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) agar inspektorat Kabupaten Simeulue dapat memberikan

layanan yang berkualitas, seperti probity, audit, dan revew LKPD dalam upaya meningkatkan kinierja Pemerintah Kabupaten Simeulue (BPKP Aceh, 2020).

Pengukuruan kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan pemerintah daerah terdapat peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya (Anshori, 2019). Peningkatan kinerja keuangan pemerintah akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, dimana semakin besar kemampuan daerah dalam menggali potensi – potensi daerah selain digunakan untuk membiayai jalannya sistem pemerintahan dan pembangunan daerah, juga digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara komprehensif dalam bentuk penelitian dengan judul: **"Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue"**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue?.
2. Apakah pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue.

3. Apakah pengawasan internal berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini iyalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan pengawaan internal secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan internal secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat menjadi masukan dan informasi dalam rangka mengoptimalkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Manfaat akademis yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan informasi bagi penelitian selanjutnya serta dapat menambah wawasan dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Hasil penelitian ini dapat menambah literatur tentang faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis tentang pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka ruang lingkup penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue yang diukur dengan menggunakan kuisioner.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Sofiati, dkk (2021:9) kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas, entitas dan potensi – potensi kinerja yang akan berlanjut. Kinerja keuangan daerah juga merupakan hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah selesai dilakukan, hasil pekerjaan itu dibandingkan dengan standar yang telah diterapkan bersama. Setiap pekerjaan yang sudah selesai dilakukan memerlukan penilaian atau pengukuran secara periodik.

Pengertian kinerja keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 1 ayat 2 Undang–undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah adalah keluaran/hasil dari program dan kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagai suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan (program) sesuai dengan sasaran dan tujuan dan misi instansi pemerintah. Sistem pengukuran kinerja dapat membantu pengelola dalam memonitor inplementasi strategi organisasi dengan cara membandingkan antara hasil/*outpot actual* dengan sasaran dan tujuan strategi. Tujuan tersebut untuk meningkat

kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah (Fitriani, 2019).

2.1.1 Tolak Ukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Adnyani (2021:169) tolak ukur kinerja kauangan adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program atau kegiatan. Tolak ukur kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja, terutama untuk menilai kewajaran anggaran biaya suatu program atau kegiatan. Tolak ukur kinerja mencakup dua hal yaitu unsur keberhasilan yang terukur dan tingkat pencapaian setiap unsur keberhasilan. Setiap program atau kegiatan minimal mempunyai satu unsur keberhasilan dan tingkat pencapaiannya (target kinerja) yang digunakan sebagai tolak ukur kinerja. Program atau kegiatan tertentu dapat diukur berdasarkan lebih dari satu unsur ukuran keberhasilan.

2.1.2 Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Kurniawan (2020:10) indikator kinerja dalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Apabila indikator atau tolak ukur kinerja tidak ditetapkan, maka pengukuran kinerja sebuah organisasi pemerintah tidak akan dapat dilakukan.

Mayasari (2021:20) mendefinisikan indikator kinerja keuangan sebagai alat untuk mengukur input, proses, *output*, hasil dan dampak dari operasi pemerintah. Indikator sangat penting untuk menentukan tujuan kinerja, melacak kemajuan menuju tujuan tersebut, dan membandingkan kinerja pada setiap lembaga yang berbeda.

Berikut ini merupakan penjelasan masing – masing indikator kinerja keuangan pemerintah daerah menurut Khusnaini (2018) berdasarkan tingkatannya yaitu:

1. Indikator Masukan (*Input*)
   Adalah sumber daya yang digunakan dalam suatu proses untuk menghasilkan keluaran yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Indikator masukan meliputi dana, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, data dan informasi lainnya yang diperlukan.
2. Indikator Keluaran (*output)*
   Adalah sesuatu yang terjadi akibat proses tertentu dengan menggunakan masukan yang telah ditetapkan. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu aktivitas atau tolak ukur dikaitkan sasaran – sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan terukur (jumlah izin yang dikeluarkan, jumlah panjang jalan yang diperbaiki, jumlah orang yang dilatih, jumlah kasus yang dikelola, jumlah dokumen yang diproses, dan jumlah klien yang dilayani).
3. Indikator Hasil (*outcome*)
   Adalah suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran. Indikator hasil adalah sasaran program yang telah ditetapkan.
1. Indikator Manfaat (*Benefit*)
   Adalah nilai tambah dari suatu hasil yang manfaatnya akan nampak setelah beberapa waktu kemudian. Indikator manfaat menunjukkan hal – hal yang diharapkan dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi optimal.
2. Indikator Dampak (*Impact*)
   Adalah pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh manfaat dari suatu kegiatan. Indikator dampak merupakan akumulasi dari beberapa manfaat yang terjadi, dampaknya baru terlihat setelah beberapa waktu kemudian.

Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Pemerintah daerah dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan serta efisiensi biaya. Dengan kata lain, indikator kinerja berperan untuk menunjukkan, memberi indikasi, atau memfokuskan perhatian pada bidang yang relevan untuk dilakukan tindakan perbaikan (Mardiasmo, 2021:183).

2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusuna Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 181 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 17-18, yang menjelaskan bahwa proses penyusunan APBD harus didasarkan pada penetapan sekala prioritas dan plafon anggaran, rencana kerja pemerintah daerah dan kebijakan umum APBD yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah.

Menurut Khusnaini (2018) menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 secara jelas menetapkan landasan dalam penataan sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam menetapkan pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah.
2. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan surat keputusan kepala daerah sesuai dengan peraturan daerah tersebut.
3. Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efesiensi dan efektifitas keuangan.
4. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

2.2.1 Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri dalam Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang asas – asas pengelolaan keuangan daerah tersebut sebagai berikut:

1. Tertib, bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti – bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Taat pada peraturan perundang – undangan, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang – undangan.
3. Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dan hasil.
4. Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai ketentuan tertentu.
5. Ekonomis adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
6. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas – luasnya tentang keuangan daerah.
7. Bertanggung jawab adalah perwujudan kewajiban seseorang mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
8. Keadilah adalah keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
9. Kepatuhan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
10. Manfaat adalah untuk masyarakat. Bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.2.2 Prinsip – Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Purnomo (2022) pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip – prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

1. Tanggungjawab (*Accountability*)
   Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang itu termasuk Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum.
2. Mampu Memenuhi Kewajiban Keuangan
   Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.
3. Kejujuran
   Hal – hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul – betul jujurdan dapat dipercaya.
4. Hasil Guna (*Effectiveness*) dan Daya Guna (*Efficiency*)
   Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah – rendahnya dan dalam waktu yang secepat – cepatnya.
5. Pengendalian
   Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD, dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

2.2.3 Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Moenek (2019) pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi kegiatan yang dijalankan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kedudukan serta kewenangannya, yang di dalamnya mencakup indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

1. Perencanaan
   Perencanaan ditinjau dari berbagai aspek, yaitu suatu proses yang terus – menerus, terdiri dari keputusan atau pemilihan dari berbagai cara untuk

menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu pada masa mendatang. Hal ini berarti bahwa sebelum melaksanakan suatu kegiatan terlebih dahulu harus membuat perencanaan yang memuat tujuan yang akan dicapai dan cara mencapai tujuan tersebut.

2. Pelaksanaan
   Dari aspek pelaksanaan, pemerintah daerah dituntut mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan daerah.
3. Penatausahaan
   Aspek penatausahaan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks penatausahaan keuangan daerah, implementasi program pemerintah daerah yang mengonsumsi sejumlah sumber daya tertentu dapat dievaluasi melalui kinerja yang dihasilkan setiap satuan kerja.
4. Pelaporan
   Pelaporan keuangan merupakan catatan informasi suatu entitas pada suatu periode yang digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Pelaporan keuangan merupakan struktur dan proses akuntansi yang menunjukkan bagaimana informasi dalam laporan keuangan tersebut disajikan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan.
5. Pertanggungjawaban
   Pertanggungjawaban merupakan perwujudan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
6. Pengawasan
   Pengawasan merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2.3 Pengawasan Internal

Menurut Rohayatin (2021:168) pengawasan internal adalah proses pengawasan yang dilakukan oleh internal pemerintah, artinya pengawas tidak terpisah dari instansi pemerintah hanya memiliki badan dan wewenang tersendiri dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan. Pengawasan internal harus dapat memberikan kontribusi kepada pihak manajemen dapat mengetahui apakah sistem pengendalian yang telah ditetapkan berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Fitriandi (2021) pengawasan inetrnal dapat diartikan sebagai proses determinasi terhadap apa yang telah dilaksanakan, yaitu

kinerja dan menerapkan perbaikan – perbaikan sehingga hasil kinerja tersebut dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan initernal bertujuan memastikan apa yang direncanakan telah dilaksanakan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Menurut Amin (2019) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendala pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan. Untuk menerapkan Sistem Pengendalian Internal tersebut maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pengawasan internal adalah salah satu bagian dari kegiatan pengendalian internal yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

2.3.1 Lingkup Pengawasan Internal

Menurut Pramesti (2018:32) penerapan pengawasan internal dalam lingkungan kerjanya yaitu mencakup:

1. Penegakan integritas dan nilai etika
2. Komitmen terhadap kompetensi
3. Kepemimpinan yang kondusif
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
5. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Fungsi pengawasan intern dijalankan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota (Simanjuntak, 2018:140).

2.3.2 Fungsi Pengawasan Internal

Menurut Arifuddin (2022:5) fungsi pengawasan internal adalah melakukan pengawasan internal yang mengarah pada conseling patner dan bukan mencari kesalahan namun menjadi penyedia daftar solusi nyata, bukan lagi menjadi pengawasan kantor, namum menjadi pengawasan yang bersifat luas dalam program/kegiatan/tujuan, bukan hanya memberi rekomendasi parsial normatif, namun usulan konsep *policy recommendation* yang menyeluruh dan impelementatif.

Menurut Amin (2019) fungsi dari pengawasan internal di pemerintah adalah untuk menilai kefektifan dari pengguna sumber daya keuangan melalui identifikasi kebocoran, ketidakefektifan, dan kecurangan anggaran dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menaikkan kinerja instansi. Pengawasan internal sangat penting dalam perkembangan organisasi, karena masalah – masalah yang timbul sangat kompleks. Dengan demikian, diperlukan suatu pengawasan internal yang baik dan memadai.

2.3.3 Indikator Pengawasan Internal

Indikator pengawasan internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dibagi menjadi lima kelompok yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
   Pimpinan Instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian internal dan manajemen yang sehat.
2. Penilaian Risiko
   Pengendalian internal harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi, baik dari luar maupun dari dalam.
3. Kegiatan Pengendalian
   Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisiensi dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.
4. Informasi dan Komunikasi
   Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak laini yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentuserta tepat waktu sehingga kemungkinan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.
5. Pemantauan
   Pemantauan harus dpat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Praktik SPIP sangat penting dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, serta untuk mencapai tujuan yang telah direncankan. Oleh sebab itu, praktik SPIP juga sangat penting untuk mencapai tata kelola pemerintah yang baik dan untuk mengamankan arah suatu organisasi serta mencegah kecurangan atau kesalahan di dalam suatu instansi.

2.4 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Sarmigi & Maryanto (2020) yang berjudul pengnaruh pengelolaan keuangan daerah dan good *governance* terhadap kinerja

pemerintah daerah, berlokasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, dengan menggunakan metode penelitian primer, analisis yang digunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten kerinci.

Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari & Prabowo (2020) yang berjudul pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah, yang berlokasi pada SKPD Kota Semarang, dengan menggunakan metode primer, alanisis yang digunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah pada SKPD Kota Semarang.

Penelitan yang dilakukan oleh Sartika, dkk (2020) yang berjudul pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang berlokasi pada BPKAD Kota Padang, dengan menggunakan metode analisis primer dan sekunder, analisis yang digunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ireeuw, dkk (2019) yang berjudul pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, yang berlokasi pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Jayapura, dengan menggunakan metode analisis primer, analisi yang digunakan

regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah, sedangkan sistem akuntansi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2018) yang berjudul analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keungan pemerintah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan	
				Persamaan	Pebedaan
1	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Good *Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten kerinci. Sarmigi, dkk (2020).	Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kerinci. Metode analisisnya yaitu regresi berganda.	pengelolaan keuangan daerah dan *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten kerinci.	Pengelolaan keuangan daerah.	Good governance, kinerja keuangan pemerintah daerah.
2	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah. Novitasari & Prabowo, Tahun (2020).	Populasi dari penelitian ini adalah bagian keuangan yang bekerja pada setiap Satuan kerja Perangkat Daerah di Wilayah Semarang Yang berjumlah 46. Daftar SKPD dengan Terdiri atas Dinas, Badan dan Kecamatan. Metode analisisnya regresi berganda.	Pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah.	Pengelolaan keuangan daerah, pengawasan internal.	kinerja keuangan pemerintah daerah.

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan	
				Persamaan	Pebedaan
3	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah . Sartika, dkk, Tahun (2020).	Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 33 kab/kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Analisis yang digunakan regresi linier berganda.	Pengelolaan keuangan daerah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.	Pengelolaan keuangan daerah. Kinerja keuangan	Sistem akuntansi keuangan daerah, pengawasan internal.
4.	Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Ireeuw dkk, Tahun (2019).	Populasi dalam penelitian ini adalah staf bagian keuangan pada organisasi perangkat daerah (ODP) kota Jayapura. Metode analisisnya yaitu regresi linier berganda.	Pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah, sedangkan sistem akuntansi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah.	Pengelolaan keuangan daerah, kinerja pemerintah.	Pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, kinerja pemerintah.
5.	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Nasution, Tahun (2018).	Populasi dalam penelitian ini berjumlah 34 organisasi perangkat daerah, variabelnya yaitu pengelolaan Keuangan daerah, akuntabilitas, transparansi dan kinerja. Metode analisisnya linier berganda	pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keungan pemerintah.	Pengelolaan keuangan daearah, kinerja keuangan pemerintah.	Pengawasan internal, akuntabilitas, transparansi.

2.5 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menunjukan adanya akuntabilitas kinerja yang terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan maka dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik mempunyai pengaruh terhadap kinerja satu instansi atau organisasi.

Tujuan utama dari pengawasan internal dalam arti luas ini tidak hanya untuk melakukan tindakan verifikasi, melainkan juga dimaksudkan untuk membantu pihak yang diawasi dalam menunaikan tugasnya secara lebih baik. Pengawasan internal dapat membantu suatu organisasi dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan dan mencegah kehilangan sumber daya, dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan juga dapat memastikan suatu organisasi mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Maka pada dasarnya pengawasan internal merupakan tindakan yang bersifat aktif, karena mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari apa yang ditetapkan (Epriliani, 2022).

Kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori – teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis (Saraswati, 2019).

Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1.

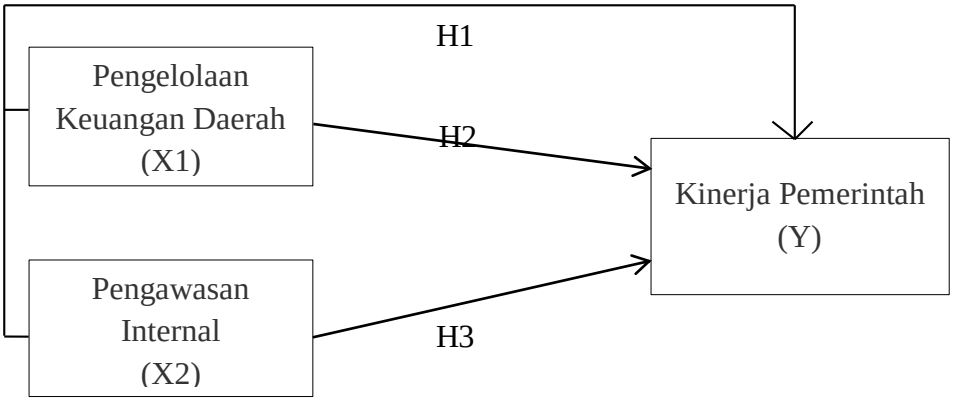

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat diketahui bahwa model penelitian ini terjadi secara satu arah untuk menjelaskan pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.6 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan dalam hipotesis alternatif (H_a) sebagai berikut:

H_1:Pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue.

H_2:Pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue.

H_3 :Pengawasan internal secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variable lain. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menaksir dan meramalkan hasilnya. Penelitian ini menekankan pada pengukuran variabel dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Seacara umum, desain penelitian yang dilakukan secara deskriptif kuantitatif berdasarkan atas kesadaran yang sistematis dalam upaya menjawab permasalahan dengan menggunakan tahapan penelitian sesuai data-data kuantitatif yang tersedia (Putri & Munandar, 2019).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah bagian keuangan yang bekerja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Simeulue yang berjumlah 35 SKPD yang terdiri atas Dinas dan Badan. Setiap SKPD diwakili 2 bagian sub keuangan, yang terdiri dari Kasubag dan Bendahara. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 70 responden dari seluruh bagian keuangan pada SKPD Kabupaten Simeulue. Untuk lebih jelasnya sampel dari populasi dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

No	SKPD Kab. Simeulue	Jumlah SKPD	Perwakilan	Jumlah
1	Dinas	30	2	60
2	Badan	5	2	10
Total				70

Sumber : Data Diolah (2023)

Pada Tabel 3.1 diperoleh jumlah populasi yang menjadi pengamatan pada penelitian ini berjumlah 70 responden.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber ahli dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original tanpa melalui perantara, dan juga hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data primer dalam penelitian ini meliputi jawaban dari responden yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung yang dibagikan kepada bagianbagian yang terkait dalam penelitian ini yang ditentukan berdsarkan penilaian peneliti. Dan data sekunder yang diperoleh dari hal-hal yang terkait dengan penelitian ini.

Dalam memperoleh atau mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. *Library Research* (Penelitian Pustaka) yaitu suatu teknik untuk mendapatkan data teoritis atau data sekunder dalam penelitian. Penelitian

kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen resmi, catatan dan transkip, yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu penelitian langsung kelapangan dalam rangka mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa, Daftar Pertanyaan (Quesioner) yaitu metode pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan dalam bentuk angket yang ditujukan kepada para responden di objek penelitian.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Variabel merupakan sesuatu yang mempunyai nilai yang dapat berbeda/berubah. Nilai ini dapat berbeda dalam waktu yang lain untuk objek yang sama atau juga dapat berbeda pada waktu yang sama untuk objek yang berbeda. Penelitian ini menggunakan dua variabel utama, yaitu variabel dependen dan variabel independen.

3.4.1 Variabel *Dependent* (Y) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel *dependent* adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang dicapai sesuai dengan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur (Nasution, 2018). Pengukuran kinerja keuangan memiliki banyak tujuan, paling tidak untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan transparansi

publik. Selain itu pengukuran kinerja keuangan pemerintah akan bermanfaat dalam hal untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran hasil dari suatu penilaian (*assessment*) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator - indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

3.4.2 Variabel *Independent*

Variabel *independent* merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen, baik berpengaruh secara positif maupun negatif. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal.

1.4.2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegritas yang diwujudkan dalam anggaran daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (Nurhaeda & Tenriola, 2022). Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan pemerintahan yang mengelola keuangan daerah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan keuangan daerah, serta pertanggungjawaban (Suhendi, 2020).

1.4.2.2 Pengawasan Internal

Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah

dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Febria, dkk, 2021).

Pengawasan Internal menurut Jatimko (2020) menyebutkan bahwa terdapat komponen dalam struktur pengawasan internal, yaitu lingkungan pengawasan, pertimbangan risiko, kegiatan pengawasan, komunikasi dan informasi, dan pemantauan. Berikut adalah rangkuman definsi operasional dan indikator dari masing – masing variabel akan dijelaskan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Definisi dan Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala	Item Pernyataan
1	Kinerja Keuangan Daerah (Y)	Kinerja keuangan merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang dicapai sesuai dengan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur (Nasution, 2018).	1. Indikator masukan 2. Indikator Keluaran 3. Indikator Hasil 4. Pengawasan 5. Indikator dampak	Likert	A.1-5 Pernyataan
2	Pengelolaan Keuangan daerah (X_1)	Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan pemerintahan yang mengelwsola keuangan daerah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan keuangan daerah, serta pertanggungjawaban (Suhendi, 2020).	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pelaporan 4. Penatausahaan 5. Pengawasan 6. Pertanggungjawaban	Likert	B. 1-6 Pernyataan
3	Pengawasan Internal (X_2)	Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai	1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian resiko 3. Aktivitas pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan	Likert	C. 1-5 Pernyataan

		bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Febria, 2021).			

Sumber: Data diolah (2023)

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan pengujian data dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka untuk menjawab rumusan masalah, serta perhitungan untuk hipotesis yang telah diajukan apakah variabel bebas (Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pengawasan internal) berpengaruh terhadap variabel terikat (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah), secara parsial maupun simultan dengan bantuan SPSS. kemudian, diambil kesimpulan pengujian data tersebut.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah penggunaan statistik untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Statistik

deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai minimal, nilai maksimal, rata-rata (mean), dan standar deviasi.

3.5.2 Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat yaitu pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Sari & Mustanda, 2019). Analisis ini juga digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Simeulue (Putri & Darmayanti, 2019). Teknik analisis regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y	= Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue
a	= Konstanta
b_1,b_2	= Koefesien Regresi
X_1	= Pengelolaan Keuangan Daerah
X_2	= Pengawasan Internal
e	= Kesalahan Gangguan (*error term*)

3.6 Pengujian Data

3.6.1 Pengujian Instrumen

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam rangka mengumpulkan data. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sarmigi & Maryanto, 2020).

Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus menggambarkan, mendukung pernyataan atau tidak mendukung skor atas pilihan jawaban untuk kuesioner yang diajukan adalah sebagai berikut:

a. Apabila jawaban Sangat Setuju (Nilai 5)
b. Apabila Jawaban Setuju (Nilai 4)
c. Apabila Jawaban Cukup Setuju (Nilai 3)
d. Apabila Jawaban Tidak Setuju (Nilai 2)
e. Apabila Jawaban Sangat Tidak Setuju (Nilai 1)

3.6.1.1 Pengujian Validitas

Pengujian validitas merupakan uji yang berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur tersebut valid atau tidak valid. Alat ukur yang dimaksud merupakan pertanyaan – pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan tersebut pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner (Gusti, dkk, 2022). Kriteria pengukuran validitas, yaitu sebagai berikut:

- Membandingkan nilai hitung r dan nilai tabel r. kriterianya jika nilai hitung r lebih besar (>) dari nilai tabel r, maka item instrumen dinyatakan valid.
- Membandingkan nilai hitung r dan nilai tabel r. Kriterianya jika nilai hitung r lebih kecil (<) dari nilai tabel r, maka item instrumen dinyatakan valid.

3.6.1.2 Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Sehingga uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Tujuannya adalah untuk mengetahui kecenderungan penggunaan instrument penelitian yang sama dan hasil yang sama pula pada waktu yang berbeda. Kriteria pengambilan keputusan untuk pengujian reliabilitas sebagai berikut:

- Jika nilai signifikan > 0,05 maka data tersebut dapat diterima.
- Jika nilai signifikan < 0,05 maka item yang digunakan kurang baik.

3.6.2 Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi tersebut benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan res presentatif maka model dari uji asumsi klasik tersebut harus memenuhi asumsi klasik regresi. Dalam

pengolahan data, perlu dilakukan uji persyaratan analisis mencakup: Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, dan Uji Heterokedastisitas

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak dan juga untuk mengetahui apakah terdapat variabel pengganggu atau residual yang datanya berdistribusi normal (Prastiwi & Aji, 2020). Uji normalitas yang dilakukan terhadap sampel dilakukan dengan menggunakan kolmogorovsmirnov test dengan menetapkan derajat keyakinan (a) sebesar 5%. Pengujian normalitas data dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai signifikan > 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal.
- Jika nilai signifikan < 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

Dalam sebuah pengujian apakah data sampel yang berasal dari populasi yang terdistribusi secara normal atau tidak perlu diajukan hipotesis sebagai berikut:

- H_0 = Data berasal dari populasi yang terdistribusikan secara normal.
- H_a = Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi secara normal.

3.6.2.2 Pengujian Multikoliniearitas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari Tolerance (TOL) dan Variance Inflation Faktor (VIF). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah

nilai Tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2018:108), dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai VIF > 10 dan Tolerance < 0,10 maka disimpulkan bahwa dalam persamaan regresi terdapat masalah multikoliearitas.
- Jika nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,10 maka disimpulkan bahwa dalam persamaan regresi tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Hipotesis yang diuji untuk membuktikan ada tidaknya multikolinieritas antara variabel bebas dinyatakan sebagai berikut:

- H_0 = Tidak terdapat hubungan antar variabel independen
- H_a = Terdapat hubungan antarvariabel independen

3.6.2.3 Pengujian Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya (Ghozali 2018:137). Jika nilai signifikan > 5% maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun hipotesis yang akan diuji untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dinyatakan sebagai berikut:

- H_0 = Tidak terjadi heteroskedastisitas di antara pengamatan dengan nilai residual absolutnya.
- H_a = Terjadi heteroskedastisitas antara data pengamatan dengan nilai residual absolutnya.

3.6.2.4 Pengujian Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018:111) Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi dapat dilihat dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW-Test), dengan ketentuan meliputi:

a. Angka D-W dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif
b. Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
c. Angka D-W di atas +2 berarti terdapat autokorelasi negatif.

3.7 Hipotesis

1.7.1 Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat (Prastiwi & Aji, 2020). Uji F dilakukan menggunakan tabel ANOVA yang bertujuan untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan. Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis secara bersama – sama (simultan) adalah sebagai berikut:

- Jika F hitung < F tabel atau P *value* (nilai signifikan > 0,05) maka H_0 tidak ditolak (H_a tidak diterima). Artinya bahwa variabel *independent* secara bersama – sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika F hitung > F tabel atau P *value* (nilai signifikan < 0,05) maka H_a tidak ditolak (H_0 tidak diterima). Artinya bahwa variabel *independent* secara bersama – sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen.

1.7.2 Pengujian Secara Parsial (Uji T)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh masing – masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat (Supraja, 2019). Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika masing – masing koefisien signifikan dari variabel bebas memiliki nilai lebih kecil dari 5% (0,05) yang ditetapkan sebagai tingkat kepercayaan, maka dapat diartikan bahwa variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat. Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis secara individu (parsial) sebagai berikut:

- Jika t hitung < t tabel atau P value (nilai signifikan > 0,05) maka H_0 tidak ditolak (H_a tidak diterima). Artinya bahwa, variabel independent secara individu (parsial) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika t hitung > t tabel atau P *value* (nilai signifikan < 0,05) maka H_a tidak ditolak (H_0 tidak diterima). Artinya bahwa variabel *independent* secara individu (parsial) berpengaruh terhadap variabel dependent.

BAB 1V

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Siemulue berjumlah 35 SKPD yang terdiri dari dinas dan badan. Data dalam penelitian ini merupakan data primer berupa kuesioner. Kuesioner didistribusikan kepada 35 SKPD yang menjadi sampel penelitian. Setiap SKPD dipilih masing-masing 2 responden untuk mengisi kuesioner penelitian. Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan cara diantar langsung oleh peneliti ke setiap instansi yang menjadi sampek penelitian.

Berdasarkan jumlah, kuesioner yang dibagikan adalah 70 kuesioner atau 35 SKPD yang menjadi sampel penelitian. Untuk lebih jelasnya mengenai deskriptif data penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Deskriptif Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah SKPD	Jumlah Kuesioner	Persentase (%)
1	Kuesioner yang dibagikan	30 Dinas	60 Kuesioner	66,7
2	Kuesioner yang dibagikan	5 Badan	10 Kuesioner	33,3
	Kuesiner yang digunakan dalam penelitian	35 SKPD	70 Kuesioner	100,0

Sumber: Data Diolah, 2023

4.2 Karakteristik Responden

Responden yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini memiliki karakteristik berdasarkan jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir, jabatan, dan masa kerja. Keberagaman karakteristik responden secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Karakteristik Responden

No	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin a. Laki-Laki b. Perempuan	34 36	48,6 51,4
Total		70	100%
2	Status Pernikahan a. Menikah b. Belum Menikah	63 7	90,0 10,0
Total		70	100%
3	Pendidikan Terakhir a. SMA b. Diploma c. Sarjana d. Pasca sarjana	6 9 50 5	8,6 12,9 71,4 7,1
Total		70	100%
4	Jabatan a. Sekretaris b. Kasubag Keuangan	50 50	50,0 50,0
Total		70	100%
5	Masa Kerja a. < 2 Tahun b. 3 – 9 Tahun c. >> 10 Tahun	3 12 55	4,3 17,1 78,6
Total		70	100%

Sumber; Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin responden didominasi oleh perempuan sebanyak 36 responden atau 51,4%. Sedangkan sisanya sebanyak 34 orang atau sebesar 48,6% berjenis kelamin laki-laki. Jika dilihat dari status pernikahan dapat dijelaskan yang sudah menikah adalah sebanyak 63 respnden atau 90,0% dan yang belum menikah sebanyak 7 responden atau 10,0%.

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas responden telah berpendidikan S1 yaitu sebanyak 50 responden atau 71,4%, kemudian diikuti oleh responden tingkat pendidikan D3 sebanyak 9 responden atau 12,9%, sisanya responden mempunyai tingkat pendidikan SMA sebanyak 6 responden atau 8,6% dan S2 sebanyak 5 responden atau 7,1%.

Selanjutnya, pada tabel 4.2 juga terlihat bahwa jabatan responden dalam penelitian ini terdiri dari kasubag keuangan dan sekretaris masing-masing sebanyak 50 atau 50,0%. Kemudian jika ditinjau dari masa kerja responden mempunyai masa kerja di atas 10 tahun yaitu sebanyak 55 responden atau sebesar 78,6% dan sisanya responden mempunyai masa kerja antara 3 sampai 9 tahun sebanyak 12 atau 17,1%.

4.2.1 Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian tentang penjelasan responden mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Penjelasan Responden terhadap Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

No	Item Pernyataan	STS		TS		N		S		SS		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Melindungi dan memelihara semua sumberdaya secara memadai.	0	0	0	0	10	14,3	37	52,9	23	32,9	4,19
2	Penyusunan anggaran sebagai hasil kerja yang dijalankan oleh unit kerja selalu dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.	0	0	0	0	10	14,3	33	47,1	27	38,6	4,24
3	Hasil penyusunan anggaran yang dibangun sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam APBD.	0	0	0	0	7	10,0	35	50,0	28	40,0	4,30
4	Kinerja dari partisipasi penyusunan anggaran yang diberikan kepada masyarakat/publik telah memberikan manfaat atau kegunaan yang tepat lokasi dan tepat waktu	0	0	1	1,4	11	15,7	36	51,4	22	31,4	4,13
	Dampak nyata dari hasil kerja partisipasi penyusunan anggaran dapat memberikan kontribusi yang memadai kepada masyarakat sesuai dengan visi, misi dan tujuan unit kerja masing – masing.	0	0	1	1,4	8	11,4	36	51,4	25	35,7	4,21
Rerata												4,21

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada penjelasan variabel kinerja keuangan pemerintah daerah diperoleh nilai rerata sebesar 4,21%. Pernyataan melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai diporeleh nilai rata-rata sebesar 4,19% yang artinya responden menyatakan setuju. Responden memahami penyusunan anggaran sebagai hasil kerja yang dijalankan oleh unit kerja selalu dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,24% yang artinya responden menyatakan setuju. Responden memahami hasil penyusunan anggaran yang dibangun sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam APBD diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,30% yang artinya responden menyatakan setuju. Responden memahami kinerja dari partisipasi penyusunan anggaran yang diberikan kepada masyarakat/publik telah memberikan manfaat atau kegunaan yang tepat lokasi dan tepat waktu diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,13% yang artinya responden menyatakan setuju. Responden memahami dampak nyata dari hasil kerja partisipasi penyusunan anggaran dapat memberikan kontribusi yang memadai kepada masyarakat sesuai dengan visi, misi dan tujuan unit kerja masing–masing diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,21% yang artinya responden menyatakan setuju.

4.2.2 Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil penelitian tentang penjelasan responden mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Penjelasan Responden terhadap Variabel Pengelolaan keuangan Daerah

No	Item Pernyataan	STS		TS		N		S		SS		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama.	0	0	0	0	7	10,0	31	44,3	32	45,7	4,36
2	APBD telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	0	0	1	1,4	7	10,0	29	41,4	33	47,1	4,34
3	Proses penatausahaan OPD telah berjalan sesuai dengan seharusnya.	0	0	0	0	9	12,9	35	50,5	26	37,1	4,24
4	Pelaporan keuangan daerah harus dibuat dalam bentuk laporan keuangan	0	0	0	0	6	8,6	32	45,7	32	45,7	4,37
5	Terdapat pengawasaan secara teratur oleh badan pengawas daerah atau inspktorat daerah.	0	0	0	0	5	7,1	26	37,1	39	55,7	4,49
6	Setiap pejabat pengelola keuangan daerah haruslah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik.	0	0	0	0	7	10,0	31	44,3	32	45,7	4,36
Rerata												4,36

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada penjelasan variabel pengelolaan keuangan daerah diperoleh nilai rerata sebesar 4,36%. Pernyataan kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,36% yang artinya responden menyatakan sangat setuju. Responden memahami APBD telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang–undangan diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,34% yang artinya responden menyatakan sangat setuju. Responden memahami proses penatausahaan OPD telah berjalan sesuai dengan seharusnya diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,24% yang artinya responden menyatakan setuju. Responden memahami pelaporan keuangan daerah harus dibuat dalam bentuk laporan keuangan diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,37% yang artinya responden menyatakan setuju dan sangat setuju. Responden mengetahui terdapat pengawasaan secara teratur oleh badan pengawas daerah atau inspktorat daerah diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,49% yang artinya responden menyatakan sangat setuju. Responden memahami setiap pejabat pengelola keuangan daerah haruslah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,36% yang artinya responden menyatakan sangat setuju.

4.2.3 Variabel Pengawasan Internal

Hasil penelitian tentang penjelasan responden mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Penjelasan Responden terhadap Variabel Pengawasan Internal

No	Item Pernyataan	STS		TS		N		S		SS		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Lingkungan pengendalian sangat berperan dalam terciptanya sebuah laporan keuangan.	0	0	0	0	12	17,1	38	54,3	20	28,6	4,11
2	Penaksiran risiko menjadi hal yang sangat penting ketika pembuatan pelaporan sedang berlangsung.	0	0	0	0	12	17,1	35	50,0	23	33,6	4,16
3	Melaksanakan aktivitas pengendalian dalam mengukur dan melaporkan pencatatan	0	0	0	0	18	25,7	29	41,4	23	32,9	4,07
4	Informasi dan komunikasi yang baik dinilai mampu menghasilkan sebuah laporan yang berkualitas	0	0	0	0	16	22,9	31	44,3	23	32,9	4,10
5	Diperlukan adanya pemantauan disemua tahap proses pembuatan laporan.	0	0	0	0	4	5,7	31	44,3	35	50,0	4,44
Rerata												4,17

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada penjelasan variabel pengawasan internal diperoleh nilai rerata sebesar 4,17%. Reponden memahami lingkungan pengendalian sangat berperan dalam terciptanya sebuah laporan keuangan diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,11% yang artinya responden menyatakan setuju.

Responden memahami penaksiran risiko menjadi hal yang sangat penting ketika pembuatan pelaporan sedang berlangsung diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,16% yang artinya responden menyatakan setuju. Responden memahami melaksanakan aktivitas pengendalian dalam mengukur dan melaporkan pencatatan diperoleh nilai 4,07% yang artinya responden menyatakan setuju. Responden memahami informasi dan komunikasi yang baik dinilai mampu menghasilkan sebuah laporan yang berkualitas diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,10% yanga artinya responden menyatakan setuju. Responden memahami diperlukan adanya pemantauan disemua tahap proses pembuatan laporan diperoleh nilai rata-rata 4,44% yang artinya responden menyatakan sangat setuju.

4.3 Satistik Deskriptif

Statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara ringkas. Hasil analisis deskriptif pada pnelitian ini menggunakan program SPSS V.20 yang dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengelolaan Keuangan Daerah	70	18,00	30,00	26,1571	2,99098
Pengawasan Internal	70	15,00	25,00	20,8857	2,69483
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	70	15,00	25,00	21,0714	2,72041
Valid N (listwise)	70				

Sumber: Data Diolah, 2023

Variabel pengelolaan keuangan daerah mempunyai bobot jawaban jawaban antara nilai *minimum* sebesar 18,00 dan nilai *maximum* 30,00 dengan nilai rata–rata (*mean*) 26,1571 dan standar deviasi 2,99098, sedangkan variabel pengawasan internal mempunyai bobot jawaban antara nilai minimum sebesar 15,00 dan nilai maximum 25,00 dengan nilai rata–rata (mean) 20,8857 dan *standar deviasi* 2,69483. Pada variabel dependen (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah) mempunyai bobot jawaban antara nilai *minimum* sebesar 15,00 dan nilai *maximum* 25,00 dengan nilai rata–rata (mean) 21,0714 dan *standar deviasi* 2,7204. Jadi pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan tingkat relative tinggi, dan nilai *standar deviasi* lebih kecil dari nilai mean yang menunjukkan data tersebut baik.

4.4 Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Metode ini menggunakan bantuan program SPSS V20. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil persamaan regresi dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,281	2,413		2,189	,032		
	Pengelolaan Keuangan Daerah	,262	,105	,288	2,493	,015	,666	1,501
	Pengawasan Internal	,428	,117	,424	3,667	,000	,666	1,501

Sumber: Data Diolah, 2023

Dari hasil pengujian regresi linier berganda di atas dapat disimpulkan persamaan sebagai berikut:

Y = 5,281 + 0,262 + 0,428 X2 + e

1. Nilai konstanta (a) bernilai positif sebesar 5,281. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai variabel pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal dianggap nol atau bernilai tetap. Maka nilai kinerja keuangan pemerintah daerah akan bernilai sebesar 5,281.
2. Nilai koefisien pengelolaan keuangan daerah bernilai positif sebesar 0,262. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu kesatuan pengelolaan keuangan daerah, maka akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,262 dengan asumsi variabel lain konstan.
3. Nilai koefisien pengawasan internal sebesar 0,428. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu kesatuan pengawasan internal, maka akan meningkatkan

kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,428 dengan asumsi variabel lain konstan.

4.5 Hasil Pengujian Data

4.5.1 Pengujian Validitas Instrumen

Uji validitas bertujuan untuk melihat apakah suatu alat ukur tersebut valid atau tidak valid. Alat ukur yang dimaksud merupakan pertanyaan – pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. jika nilai hitung r lebih besar (>) dari nilai tabel r, maka item instrumen dinyatakan valid. Hasil uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Validitas Instrumen

Item Pernyataan	Variabel	Pearson Correlation R Hitung	R Tabel	Keterangan
Y1	Kinerja Pemerintah Daerah	0,705	0,235	Valid
Y2		0,755	0,235	Valid
Y3		0,785	0,235	Valid
Y4		0,711	0,235	Valid
Y5		0,793	0,235	Valid
X1.1	Pengelolaan Keuangan Daerah	0,705	0,235	Valid
X1.2		0,755	0,235	Valid
X1.3		0.785	0,235	Valid
X1.4		0,755	0,235	Valid
X1.5		0,711	0,235	Valid
X1.6		0,793	0,235	Valid
X2.1	Pengawasan Internal	0,785	0,235	Valid
X2.2		0,823	0,235	Valid
X2.3		0,796	0,235	Valid
X2.4		0,800	0,235	Valid
X2.5		0,645	0,235	Valid

Sumber: Data Diolah, 2023

Dilihat pada tabel di atas diketahui hasil uji validitas semua variabel dinyatakan valid karena nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari nilai R tabel yaitu 0,235 dengan taraf signifikan 5%.

4.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui kecenderungan penggunaan instrument penelitian yang sama dan hasil yang sama pula pada waktu yang berbeda. Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen

No	Variabel	*Cronbach's alpha*	Keterangan
1	Pengelolaan Keuangan Daerah	0,845	Handal
2	Pengawasan Internal	0,829	Handal
3	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	0,854	Handal

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarakan tabel 4.9, dapat disimpulkan bahwa variabel pengelolaan keuangan daerah, pengawasan internal dan kinerja keuangan pemerintah daerah hasilnya reliabel sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut.

4.5.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mendeteksi apakah residual yang digunakan berdistribusi normal maka dideteksi dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dan grafik. Jika data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, dengan demikian model regresi layak digunakan dalam penelitian ini karena memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas dengan menggunakan SPSS V.20 dapat dilihat pada gambar 4.1.

Gambar 4.1
Hasil pengujian Normalitas

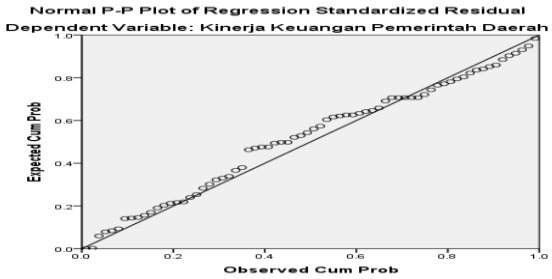

Berdasarkan gambar 4.1 grafik P-Plot di atas, data dalam penelitian berdistribusi normal karena penyebaran data ploting mengikuti garis diagonal seperti yang terlihat pada gambar di atas.

4.5.4 Uji Multikoliniearitas

Pengujian multikoliniearitas diuji dengan melihat nilai VIF dari masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent. Apabila VIF < 5 maka tidak terjadi multikoliniearitas. Hasil pengujian multikoliniearitas dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10
Nilai VIF Variabel Bebas

No	Variabel Bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
1	Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1)	0,666	1,501	
2	Pengawasan Internal (X_2)	0,666	1,501	

Berdasarkan tabel 3.10 dapat dijelaskan bahwa nilai VIF untuk variabel pengelolaan keuangan daerah diperoleh nilai sebesar 1,501 dan pada variabel pengawasan internal diperoleh nilai sebesar 1,501. Jika nilai VIF > 10 dan *Tolerance* < 0,10 maka persamaan regresi terdapat masalah multikolinearitas, dan jika nilai VIF < 10 dan *Tolerance* > 0,10 maka persamaan regresi tidak terdapat masalah multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diketahui bahwa nilai semua variabel independen adalah nilai VIF < 10 yaitu sebesar 1,501. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antar variabel independen.

4.5.5 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Adapun cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.2.

Gambar 4.2
Hasil Pengujian heteroskedastisitas

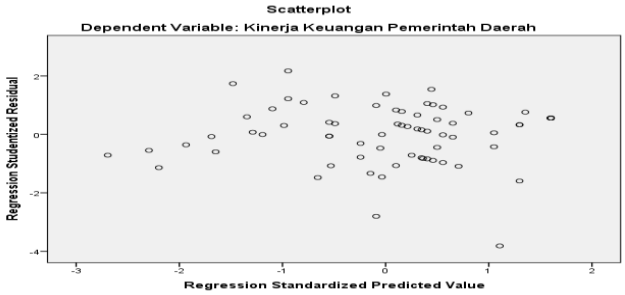

Setelah dilakukan pengujian heteroskedastisitas, terlihat dari gambar *scatterplot* di atas menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas (berkembang, melebar kemudian menyempit) pada gambar *scatterplot*, serta titik–titik menyebar secara acak di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpukan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam arti bahwa varian dari residual antara variabel dependen dan independen memiliki jenis varian residual yang sama sehingga dikatakan bahwa uji asumsi klasik terpenuhi.

4.5.6 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu

pada periode sebelumnya. Berdasarkan hasil uji autokorelasi diketahui bahwa nilai du sebesar 1,671 < Durbin Watson 1,886 < 4-du 2,329. Jadi, karena nilai Durbin Watson terletak antara du sampai dengan 4-du maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi. Dengan demikian, maka asumsi klasik sudah terpenuhi mulai dari normalitas, multikoliniearitas, heteroskedastisitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

4.6 Hasil Pengujian Hipotesis

4.6.1 Hasil pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 22,681 sementara F_{tabel} sebesar 3,13. dengan taraf signifikansi 0,000. Taraf signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan hipotesis apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan tingkat signifikan 5%, H_a diterima H_o ditolak. Pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel Anova.

Tabel 4.11
Hasil Pengujian Secara Simultan

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	206,154	2	103,077	22,681	.000[b]
	Residual	304,489	67	4,545		
	Total	510,643	69			

Sumber: Data Diolah, 2023

Uji koefisien determinasi perlu digunakan untuk menunjukkan seberapa besar persentase variasi dalam variabel diperlukan yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam variabel independen. Untuk lebih jelasnya hasil uji koefisien detreminan dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.12
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.635[a]	,404	,386	2,132	1,886

Sumber; Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi yang menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,386 atau 38,6%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 38,6%, sedangkan sisanya sebesar 62,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.6.2 Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji T)

Uji t (uji koefisien regresi secara parsial) digunakan untuk mengetahui tingkat apakah secara parsial pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal berpengaruh signifikan atau tidah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini berdasarkan nilai t_{hitung} masing – masing koefisien dengan t_{tabel}, dengan tingkat signifikansi 5%. Untuk lebih jelasnya hasil pengujian secara parsial dapat dilihat pada tabel 4.13.

Tabel 4.13
Hasil Pengujian Seacara Parsial (Uji T)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,281	2,413		2,189	,032
	Pengelolaan Keuangan Daerah	,262	,105	,288	2,493	,015
	Pengawasan Internal	,428	,117	,424	3,667	,000

Sumber: Data Diolah, 2023

Dapat disimpulkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,493 > t_{tabel} 1.996 dan nilai signifikan 0,015 < 0,05. Hal ini berarti nilai signifikan pengelolaan keuangan daerah lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Dengan demikian disimpulkan bahwa Ha_2 diterima, artinya pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil perhitungan variabel pengawasan internal diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,667 > t_{tabel} 1.996 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hal ini berarti nilai signifikan pengawasan internal lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Dengan demikian disimpulkan bahwa Ha_3 diterima, artinya pengawasan internal secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.7 Pembahasan

Hasil penelitian telah diperoleh melalui pengujian regresi berganda pada bagian sebelumnya. Selanjutnya pembahasan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah akan dibahas sebagai berikut:

4.7.1 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal secara Simultan terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 22,681 > F_{tabel} 3.13 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Artinya analisis statistik dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis Ha_1 diterima. Pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinilai dari meningkatnya pembangunan dalam bidang ekonomi. Masyarakat luas menilai keberhasilan kinerja keuangan pemerintah melalui pembangunan infastruktur. Dalam pembangunan insfastruktur tidak akan berhasil tanpa adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik oleh pemerintah dalam mengelola APBD. Dengan terealisasinya APBD pemerintah sejalan dengan terlaksananya program–program pemerintahan yang mendukung kepentingan rakyat, maka telah menjamin kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut semakin baik.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah sudah terealisasi dengan baik walaupun ada beberapa hal yang belum tercapai seperti produk anggaran, sehingga berdampak terhadap masyarakat karena belum merasakan secara merata, yang disebabkan pencapaian realisasi anggaran setiap tahun tidak mencapai target dan kurangnya pemahaman aparat dalam penyusunan anggaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sartika, dkk (2020) yang berjudul pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan daerah sistem akuntansi keuangan daerah

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah.

4.7.2 Pengaruh pengelolaan Keuangan Daerah secara Parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Dari hasil pengujian hipotesis pengelolaan keuangan daerah menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,493 > t tabel 1.996 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,015 < 0,05. Hal ini berarti nilai t_{hitung} dari penelitian lebih besar dibandingkan R tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Artinya analisis statistik dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis Ha_2 diterima yaitu pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pengelolaan keuangan daerah berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue seperti kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan pemerintah daerah tentang ABPD beserta lampirannya kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama, APBD telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, proses penatausahaan OPD telah berjalan sesuai dengan seharusnya, Pelaporan keuangan daerah harus dibuat dalam bentuk laporan keuangan, terdapat pengawasan secara teratur oleh badan pengawas daerah atau Inspektorat daerah, setiap pejabat pengelola keuangan daerah haruslah menyusun laporan pertanggungjawaban

keuangan secara periodik. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti pengalaman dan pengetahuan mengenai proses pengelolan keuangan daerah. Sehingga disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sangat penting dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian sebelumnya Nasution (2018) tentang analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah yang dimana variabel pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan sangat erat. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan eksekutif tentang pengelolaan keuangan daerah ditingkatkan maka dapat mendorong kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.7.3 Pengaruh Pengawasan Internal secara parsial Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 3,667 > 1.996 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} dari penelitian ini lebih besar dibandingkan R tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Artinya analisis statistik dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis Ha_3 diterima yaitu pengawasan internal berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pengawasan internal sudah terlaksana dengan baik dalam operasionalnya. Sehingga berdampak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue, seperti lingkungan pengendalian sangat berperan penting dalam terciptanya sebuah laporan keuangan, penaksiran risiko menjadi hal yang sangat penting ketika pembuatan pelaporan sedang berlangsung, melaksanakan aktivitas pengendalian dalam mengukur dan melaporkan pencatatan, informasi dan komunikasi yang baik dinilai mampu menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan adanya pemantauan disemua tahap proses pembuatan laporan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Amin (2019) yang mana fungsi pengawasan internal adalah untuk menilai keefektifan dari pengguna sumber daya keuangan melalui identifikasi kebocoran, ketidakefektifan, dan kecurangan anggaran dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan effisiensi operasional. Dengan demikian kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue dapat terarah dalam mencapai tujuan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Novitasari & Prabowo (2020) yang meneliti tentang pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Selain itu penyimpangan dan penyelewengan juga akan terminimalisir karena satuan kerja

menggunakan prosedur yang merupakan bagian dari pengawasan sebagai salah satu dasar pelaksanaan k

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah sudah terealisasi dengan baik walaupun ada beberapa hal yang belum tercapai seperti produk anggaran, sehingga berdampak terhadap masyarakat karena belum merasakan secara merata, yang disebabkan pencapaian realisasi anggaran setiap tahun tidak mencapai target dan kurangnya pemahaman aparat dalam penyusunan anggaran.
2. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengelolaan keuangan daerah berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang disebabkan beberapa faktor seperti pengalaman dan pengetahuan mengenai proses pengelolan keuangan daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sangat penting dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Pengawasan internal berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue. Hal ini menunjukkan bahwa

pengawasan internal berdampak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang disebabkan beberapa faktor seperti pengalaman dan pengetahuan mengenai proses pengelolan keuangan daerah. Sehingga disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sangat penting dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue. Adapun saran-saran yang diberikan bagi pemerintah daerah Kabupaten Simeulue adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Simeulue harus meningkatkan konsistensi dalam penerapan pengelolaan keuangan daerah sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik dan optimal agar tidak menimbulkan kerugian pada negara. Selain itu perlu meninjau ulang mengenai peraturan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga pengelolaan keuangan daerah jauh lebih baik dan mencerminkan secara langsung kinerja keuangan pemerintah.
2. Pemerintah Kabupaten Simeulue harus lebih meningkatkan pengawasan internal pada setiap SKPD Di Kabupaten Simeulue. terutama pada indikator informasi dan komunikasi agar penyelenggaraan komunikasi atas informasi dapat dilakukan secara efektif. Selanjutnya, lebih meningkatkan tata kerja,

sumber daya manusia yang ada serta transformasi digital dan metodelogi pembangunan. sehingga menggerakkan roda aktivitas kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue.

3. Bagi Akademik, diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran dalam hal ilmu akuntansi dan dapat memeberikan informasi tentang keterkaitan antara variabel yang diteliti dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Peneliti selanjutnya apabila melakukan penelitian yang sama, diharapkan dapat menambah indikator, metode penelitian yang sama tetapi teknik analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya baik oleh peneliti maupun p

DAFTAR PUSTAKA

Amin, F. (2019). "*Penganggaran Di Pemerintah Daerah*". Malang: UB Press.

Anshori, Z. (2019). "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 016–2018 (Studi Kasus Pada Bpkad Kab. Lamongan)". *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI), 4*(2), 1113-1132.

Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). "*Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah"* (Doctoral dissertation, Udayana University).

Adnyani, N. K. S. (2021). *"Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal".* Kota Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Arifuddin. (2022). "*Audit Internal Refleksi Bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah*". Bandung: Media Sains Indonesia.

Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (2022). "*SEKDA Kabupaten Simeulue Apresiasi Layanan Consulting PBJ Oleh BPKP Aceh*". https://www.bpkp.go.id. Diakses 19 Januari 022.

Epriliani, D. (2022). "Pengaruh Penerapan Good Governance, Pengawasan Intern Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *10*(1), 79-90.

Febria, A., Taufik, T., & Safitri, D. (2021). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Pengawasan Internal Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, *14*(1), 37-44.

Fitriandi, P., dkk. (2021). "*Bunga Rampai Keuangan Negara*". Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.

Fitriani, Dkk. (2019). *"Reformasi Kebijakan Haluan Negara : Antara Realita dan Cita - Cita"*. Medan: Enam Media.

Ghozali, I. 018. "*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 5*." Edisi Kesembilan. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.

Gusti, S. P., Herabudin, H., & Salamatul, S. (2022). "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik Di Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2018-2020". *Jurnalku, 2*(3), 254-268.

Ireeuw, S. V. M., Layuk, P. K. A., & Rante, A. (2019). "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 14*(1), 87-99.

Jatmiko, B. (2020). "Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman". *Jurnal Akuntansi Trisakti*, *7*(2), 31.

Khairiah, N., & Safira, B. (2021). *Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Pariwisata Kota Medan* (Doctoral dissertation, UMSU).

Khusnaini, M. (2018). "*Keuangan Daerah*". Malang: UB Press

Kurniawan, A., & Sutawijaya, N. I. (2020). "*Audit Kinerja*". Yogyakarta: ANDI BPFE.

Mardiasmo, (2021). "*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*". Yogyakarta: IKAPI.

Mayasari R. (2021). "*Buku Monogrof Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dan Model Penilaiannya*". Yogyakarta: Deepublish.

Moenek, R & Suwanda, D. (2019). "*Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*". Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nasution, D. A. D. (2018). "Analisis Pengaruh pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah". *Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, (3),* 149-162.

Novitasari, D. R., & Prabowo, T. J. W. (2020). "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang)". *Diponegoro Journal of Accounting, 9(2).*

Nurhaeda, A., & Tenriola, A. (2022). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntanbilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. *Tangible Journal*, *7*(2), 161-170.

Pemerintahan Kabupaten Simeulue (2022). "*Lagi, PEMKAB Simeulue Terima WTP*". https://www.simeuluekab.go.id. Diakses 1 Desember 021.

Pramesti, E. A., dkk. (2018). "*Audit Keuangan Sektor Publik Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran

013-2018". *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, 28*(1), 89-105.

Purnomo, A. R., dkk. (2022). "*Penggalian dan Maksimalisasi Potensi Retribusi Daerah*". Ronowijayan Siman Ponorogo: Gracia Logis Kreatif.

Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). "Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali". *E-Jurnal Manajemen, 8*(5), 834-2861.

Putri, R. S. E., & Munandar, A. (2021). "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 016-2020". *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 5*(3), 96-2313.

Rasdalima, R. J. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *17*(01).

Redaksi (2020). "*Simeulue Masuk 3 Kabupaten/Kota Di aceh Yang Tak Menerima Insentif DID*". https://waspadaaceh.com. Diakses 1 Desember 2020.

Rohayatin T. (2021). "*Dasar – Dasar Ilmu Pemerintahan*". Yogyakarta: Depublish.

Saraswati, D. (2019). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, *9*(2), 110-120.

Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 8*(8), 4759.

Sarmigi, E., & Maryanto, M. (2020). "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci". *Jurnal Apresiasi Ekonomi, 8*(1), 153-162.

Sartika, D., Monita, D. C., & Ilyas, A. (2020). "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah (Studi kasus pada BPKAD di Kota Padang)". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, *22*(2), 195-209.

Simanjuntak, E. (2018). "*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*". Jakarta Timur : Sinar Grafika.

Sofiati A. n., Sudaryo Y., & Sjarif D. (2021), "*Keuangan di Era Otonomi Daerah*". Yogyakarta : STIE INABA.

Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 10*(1), 115-130.

Suhendi, I. A. (2020). "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Bpkad Pemerintah Kota Cimahi)". (*Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia*).

Zamra, S & Ernawati. (2019). "Perkembangan Kabupaten Solok setelah otonomi daerah tahun 1998-2019". *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 4*(2), 53-58.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar SKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022/2023

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue
1	Dinas Pendidikan
2	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
3	Dinas Kesehatan
4	Rumah Sakit Umum Daerah
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Dinas Sosial
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
11	Dinas Pertanahan
12	Dinas Lingkup Hidup
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
15	Dinas Perhubungan
16	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Dinas Pemuda Dan Olahraga
19	Dinas Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Daerah
20	Dinas Kelautan Dan Perikanan
21	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
22	Dinas Perkebenunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan
23	Dinas Pertaninan Dan Pangan
24	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
25	Sekretariat Daerah
26	Sekretariat Dprk
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
28	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
30	Inspektorat Daerah
31	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
32	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
33	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten
34	Dinas Syariat Islam
35	Sekretariat Majelis Adat Aceh

Lampiran 2: Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Bpk/Ibu/Sdr…...

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya :

Nama : Erin Almudi

NPM : 1802110153

Program Studi : Akuntansi

Bermaksud untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "**Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Keungan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue".** Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr selaku untuk menjadi responden dan menjawab seluruh item pertanyaan secara objektif sesuai dengan petunjuk pengisian.

Saat melakukan pengisian kuesioner ini, dimohon Bapak/Ibu/Saudara/I terlebih dahulu membaca petunjuk pengisian kuesioner yang sudah tertera. Apapun jawaban Bapak/Ibu/Saudara/I akan sangat berharga dan bermanfaat bagi penelitian. Atas kerjasama, bantuan dan kesedian Bapak/Ibu/Saudara/I untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya

Erin Almudi

IDENTITAS RESPONDEN

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr mengisi daftar di bawah ini:

1. Nama : ……..... Boleh Dikosongkan
2. Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan
3. Umur : ……...
4. Pendidikan Terakhir :
   - ☐ SMA/Sederajat
   - ☐ Diploma 3
   - ☐ Strata 1
   - ☐ Strata 2
   - ☐ Lainnya ……...
5. Lama Bekerja : ……...
6. Bagian/Departemen : ……...
7. Jabatan : ……...

Petunjuk Pengisian :

1. Mohon dengan hormat, bantuan, dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam kuisioner ini.
2. Beri tanda centang (√) pertanyaan berikut dengan keadaan yang sesungguhnya pada kolom yang tersedia.
3. Ada 5 (lima) pilihan jawaban yang tersedia untuk masing-masing pertanyaan serta penilaian yaitu :

STS	= Sangat Tidak Setuju	: Nilai 1
TS	= Tidak Setuju	: Nilai 2
N	= Netral	: Nilai 3
S	= Setuju	: Nilai 4
SS	= Sangat Setuju	: Nilai 5

1. Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1)

NO	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama.					
2	APBD telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.					
3	Proses penatausahaan OPD telah berjalan sesuai dengan seharusnya.					
4	Pelaporan keuangan daerah harus dibuat dalam bentuk laporan keuangan					
5	Terdapat pengawasaan secara teratur oleh badan pengawas daerah atau inspktorat daerah.					
6	Setiap pejabat pengelola keuangan daerah haruslah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik.					

2. Pengawasan Internal (X_2)

NO	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Lingkungan pengendalian sangat berperan dalam terciptanya sebuah laporan keuangan.					
2	Penaksiran risiko menjadi hal yang sangat penting ketika pembuatan pelaporan sedang berlangsung.					
3	Melaksanakan aktivitas pengendalian dalam mengukur dan melaporkan pencatatan					

NO	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
4	Informasi dan komunikasi yang baik dinilai mampu menghasilkan sebuah laporan yang berkualitas					
5	Diperlukan adanya pemantauan disemua tahap proses pembuatan laporan.					

3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

NO	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Melindungi dan memelihara semua sumberdaya secara memadai.					
2	Penyusunan anggaran sebagai hasil kerja yang dijalankan oleh unit kerja selalu dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.					
3	Hasil penyusunan anggaran yang dibangun sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam APBD.					
4	Kinerja dari partisipasi penyusunan anggaran yang diberikan kepada masyarakat/publik telah memberikan manfaat atau kegunaan yang tepat lokasi dan tepat waktu					
5	Dampak nyata dari hasil kerja partisipasi penyusunan anggaran dapat memberikan kontribusi yang memadai kepada masyarakat sesuai dengan visi, misi dan tujuan unit kerja masing – masing.					

Lampiran 3: Tabel Tabulasi Data Kuesioner

No	Karakteristik Responden					Pernyataan					Y	Pernyataan						X1	Pernyataan					X2
	IR1	IR2	IR3	IR4	IR5	A1	A2	A3	A4	A5		B1	B2	B3	B4	B5	B6		C1	C2	C3	C4	C5	
1	2	1	3	1	3	4	4	4	4	4	4.00	5	5	5	5	5	5	5.00	4	4	4	4	4	4.00
2	2	1	3	2	3	4	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4.00
3	1	1	3	2	3	4	5	4	4	5	4.40	4	4	3	4	5	4	4.00	4	3	4	4	4	3.80
4	1	1	3	1	2	5	5	4	4	4	4.40	4	4	4	5	5	5	4.50	4	4	4	5	5	4.40
5	2	1	1	2	3	4	4	4	4	4	4.00	5	4	4	4	5	4	4.33	4	4	4	4	4	4.00
6	1	1	2	1	1	4	4	4	3	4	3.80	5	5	4	4	4	4	4.33	4	4	4	4	4	4.00
7	2	1	3	2	2	5	5	5	4	5	4.80	5	5	4	5	5	4	4.67	5	5	5	5	5	5.00
8	2	1	3	1	2	5	5	5	4	5	4.80	5	5	4	5	5	4	4.67	5	5	5	5	5	5.00
9	1	1	4	1	3	5	5	5	5	5	5.00	5	5	5	5	5	5	5.00	5	5	5	5	4	4.80
10	2	1	3	2	3	4	4	4	4	4	4.00	5	4	4	5	4	5	4.50	4	4	4	5	5	4.40
11	2	1	3	2	3	4	4	5	5	5	4.60	5	5	5	4	4	5	4.67	4	4	4	4	5	4.20
12	2	1	2	1	3	5	4	5	4	4	4.40	4	4	4	5	5	5	4.50	4	5	4	4	4	4.20
13	2	1	1	1	3	4	5	5	5	4	4.60	4	5	4	5	4	5	4.50	4	4	5	4	4	4.20
14	2	1	2	2	3	4	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4.00
15	2	1	2	1	3	5	5	5	4	5	4.80	4	5	4	4	5	4	4.33	5	4	4	4	4	4.20
16	1	1	2	2	3	3	4	4	3	3	3.40	4	3	4	4	4	4	3.83	3	3	3	3	3	3.00
17	1	1	3	1	2	4	3	5	5	4	4.20	5	4	4	3	5	5	4.33	4	4	3	4	4	3.80
18	1	1	3	2	1	3	3	3	3	3	3.00	3	3	3	3	3	3	3.00	3	3	3	3	3	3.00
19	1	1	3	2	3	5	5	4	4	5	4.60	4	4	5	5	5	4	4.50	4	4	3	5	4	4.00
20	1	2	3	1	3	4	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4	5	4	4.17	4	5	5	5	4	4.60
21	2	1	3	1	3	3	3	3	4	5	3.60	5	4	5	5	5	5	4.83	3	4	3	4	3	3.40

22	1	2	1	2	3	5	3	5	2	2	3.40	4	2	4	4	3	3	3.33	5	4	3	5	5	4.40
23	1	1	3	1	3	3	3	3	3	3	3.00	5	5	5	5	5	5	5.00	4	5	5	5	4	4.60
24	2	1	3	2	3	3	4	4	3	4	3.60	4	5	5	5	5	5	4.83	3	3	4	4	5	3.80
25	1	1	2	2	3	4	4	4	4	4	4.00	4	4	3	3	5	5	4.00	4	4	5	5	4	4.40
26	2	1	1	1	3	4	4	4	4	4	4.00	4	4	5	4	5	4	4.33	3	3	3	3	5	3.40
27	2	1	3	2	2	3	3	3	3	3	3.00	3	3	3	3	3	3	3.00	3	3	3	3	5	3.40
28	2	1	3	1	2	4	5	4	4	4	4.20	5	5	4	5	5	5	4.83	4	4	4	3	4	3.80
29	2	1	3	1	3	4	4	4	4	4	4.00	4	4	5	5	5	5	4.67	5	5	5	5	5	5.00
30	1	1	3	2	3	5	5	4	5	4	4.60	4	5	5	4	4	4	4.33	5	5	4	4	5	4.60
31	1	1	3	1	3	4	4	4	5	5	4.40	5	5	4	4	4	4	4.33	3	3	3	3	3	3.00
32	1	2	3	2	3	4	5	5	5	5	4.80	4	5	5	4	5	5	4.67	5	5	4	5	4	4.60
33	1	1	1	2	3	3	4	4	3	3	3.40	3	4	3	4	3	3	3.33	4	4	3	3	4	3.60
34	1	1	3	1	2	5	4	5	4	4	4.40	5	5	5	5	4	5	4.83	4	4	4	4	4	4.00
35	1	1	3	2	2	4	5	5	4	5	4.60	5	4	4	5	4	4	4.33	3	3	3	5	5	3.80
36	1	1	2	1	2	4	4	5	4	5	4.40	5	5	5	5	5	5	5.00	4	4	4	3	4	3.80
37	1	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3.00	5	5	4	4	5	4	4.50	4	4	4	4	4	4.00
38	1	1	3	1	3	5	4	5	5	4	4.60	3	4	4	4	5	5	4.17	4	5	4	4	5	4.40
39	1	1	3	1	3	4	4	3	4	5	4.00	4	5	5	5	5	5	4.83	5	4	4	4	5	4.40
40	2	1	4	2	3	4	4	4	4	4	4.00	4	3	3	4	4	4	3.67	4	3	3	4	4	3.60
41	2	1	3	1	3	5	5	5	5	5	5.00	5	5	5	5	5	5	5.00	5	5	5	5	5	5.00
42	1	1	2	2	3	4	4	4	4	4	4.00	5	5	4	5	5	5	4.83	5	4	4	4	4	4.20
43	2	1	3	1	3	5	4	4	4	4	4.20	4	4	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4.00
44	2	1	1	2	3	4	4	4	5	5	4.40	4	4	4	4	4	5	4.17	4	4	5	5	5	4.60
45	2	1	3	1	3	5	5	5	5	5	5.00	5	5	5	5	5	5	5.00	5	5	5	5	5	5.00
46	1	1	3	2	3	3	3	4	3	3	3.20	3	3	3	3	4	3	3.17	3	3	3	3	4	3.20
47	2	1	3	1	3	5	5	5	5	5	5.00	5	5	5	5	5	5	5.00	5	5	5	5	5	5.00

48	1	1	3	2	3	4	4	4	4	4	4.00	4	5	5	4	4	4	4.33	5	4	4	4	5	4.40
49	2	1	3	1	3	5	5	5	5	5	5.00	5	5	5	5	5	5	5.00	5	5	5	5	5	5.00
50	2	1	3	2	3	5	5	4	5	4	4.60	5	5	4	5	5	4	4.67	4	5	5	5	5	4.80
51	1	1	3	2	3	4	3	4	3	4	3.60	4	4	4	4	4	3	3.83	3	3	3	3	4	3.20
52	1	1	4	1	3	4	5	5	5	5	4.80	5	5	4	4	5	4	4.50	4	5	5	4	4	4.40
53	2	2	3	1	2	4	5	5	4	4	4.40	4	5	5	5	4	5	4.67	4	5	4	4	5	4.40
54	2	1	3	2	3	5	5	5	5	5	5.00	4	4	4	4	4	4	4.00	5	5	4	5	5	4.80
55	1	1	4	1	3	4	4	4	3	4	3.80	3	3	4	5	4	4	3.83	3	3	5	3	4	3.60
56	1	2	4	2	3	4	4	4	4	4	4.00	4	5	5	4	5	5	4.67	4	4	5	4	5	4.40
57	1	1	3	1	1	4	4	4	4	3	3.80	3	4	4	4	5	4	4.00	3	4	3	3	4	3.40
58	2	1	3	2	2	4	4	4	5	4	4.20	4	5	4	4	4	5	4.33	4	4	5	5	5	4.60
59	2	1	3	1	2	4	5	4	4	4	4.20	4	4	3	4	4	3	3.67	4	5	3	3	4	3.80
60	1	1	2	2	3	5	5	5	5	5	5.00	5	5	5	5	5	5	5.00	5	5	5	5	5	5.00
61	2	1	3	2	3	4	4	5	4	5	4.40	5	4	5	5	5	4	4.67	5	5	5	4	5	4.80
62	1	1	3	1	3	4	4	5	5	4	4.40	4	4	3	4	4	4	3.83	4	4	3	3	5	3.80
63	2	1	3	1	3	5	5	5	4	5	4.80	4	5	5	5	5	5	4.83	4	4	4	4	5	4.20
64	1	2	3	2	3	5	5	4	5	4	4.60	5	4	5	5	4	4	4.50	4	5	5	4	5	4.60
65	2	1	3	1	3	5	5	5	5	4	4.80	4	5	4	3	3	4	3.83	5	4	3	3	4	3.80
66	2	1	3	2	3	4	3	4	4	4	3.80	5	3	4	4	5	4	4.17	4	4	5	4	5	4.40
67	2	1	3	1	3	4	5	5	5	5	4.80	5	5	4	5	4	5	4.67	4	4	5	4	5	4.40
68	2	1	3	2	3	4	4	5	4	5	4.40	5	4	5	5	5	4	4.67	5	4	4	3	5	4.20
69	1	1	3	2	3	3	4	3	4	4	3.60	5	4	4	4	4	4	4.17	4	4	4	4	5	4.20
70	2	1	3	1	3	5	5	4	4	4	4.40	5	4	4	4	5	5	4.50	4	5	4	5	5	4.60

Lampiran 4: Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengelolaan Keuangan Daerah	70	18,00	30,00	26,1571	2,99098
Pengawasan Internal	70	15,00	25,00	20,8857	2,69483
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	70	15,00	25,00	21,0714	2,72041
Valid N (listwise)	70				

Lampiran 5: Hasil Regresi Linier Berganda

Correlations

		Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengawasan Internal
Pearson Correlation	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	1,000	,533	,590
	Pengelolaan Keuangan Daerah	,533	1,000	,578
	Pengawasan Internal	,590	,578	1,000
Sig. (1-tailed)	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah		,000	,000
	Pengelolaan Keuangan Daerah	,000		,000
	Pengawasan Internal	,000	,000	
N	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	70	70	70
	Pengelolaan Keuangan Daerah	70	70	70
	Pengawasan Internal	70	70	70

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengawasan Internal, Pengelolaan Keuangan Daerah[b]		Enter

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

b. All requested variables entered.

Tabel Koefisien Determinasi
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.635[a]	,404	,386	2,132	1,886

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Internal, Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel Regresi Linier Berganda
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,281	2,413		2,189	,032		
	Pengelolaan Keuangan Daerah	,262	,105	,288	2,493	,015	,666	1,501
	Pengawasan Internal	,428	,117	,424	3,667	,000	,666	1,501

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel Uji F
ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	206,154	2	103,077	22,681	.000[b]
	Residual	304,489	67	4,545		
	Total	510,643	69			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), Pengawasan Internal, Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran 6: Tabel Distribusi Nilai T_{tabel} Alpha α=5%

df	0,05	0,025		df	0,05	0,025		df	0,05	0,025
1	6.314	12.706		53	1.674	2.006		105	1.659	1.983
2	2.920	4.303		54	1.674	2.005		106	1.659	1.983
3	2.353	3.182		55	1.673	2.004		107	1.659	1.982
4	2.132	2.776		56	1.673	2.003		108	1.659	1.982
5	2.015	2.571		57	1.672	2.002		109	1.659	1.982
6	1.943	2.447		58	1.672	2002		110	1.659	1.982
7	1.895	2.365		59	1.671	2.001		111	1.659	1.982
8	1.860	2.306		60	1.671	2.000		112	1.659	1.981
9	1.833	2.262		61	1.670	2.000		113	1.658	1.981
10	1.812	2.228		62	1.670	1.999		114	1.658	1.981
11	1.796	2.201		63	1.669	1.998		115	1.658	1.981
12	1.782	2.179		64	1.669	1.998		116	1.658	1.981
13	1.771	2.160		65	1.669	1.997		117	1.658	1.980
14	1.761	2.145		66	1.668	1.997		118	1.658	1.980
15	1.753	2.131		67	1.668	1.996		119	1.658	1.980
16	1.746	2.120		68	1.668	1.995		120	1.658	1.980
17	1.740	2.110		69	1.667	1.995		121	1.658	1.980
18	1.734	2.101		70	1.667	1.994		122	1.657	1.980
19	1.729	2.093		71	1.667	1.995		123	1.657	1.979
20	1.725	2.086		72	1.666	1.993		124	1.657	1.979
21	1.721	2.080		73	1.666	1.993		125	1.657	1.979
22	1.717	2.074		74	1.666	1.993		126	1.657	1.979
23	1.714	2.069		75	1.665	1.992		127	1.657	1.979
24	1.711	2.064		76	1.665	1.992		128	1.657	1.979
25	1.708	2.060		77	1.665	1.991		129	1.657	1.979
26	1.706	2.056		78	1.665	1.991		130	1.657	1.978
27	1.703	2.052		79	1.664	1.990		131	1.657	1.978
28	1.701	2.048		80	1.664	1.990		132	1.656	1.978
29	1.699	2.045		81	1.664	1.990		133	1.656	1.978
30	1.697	2.042		82	1.664	1.989		134	1.656	1.978
31	1.696	2.040		83	1.663	1.989		135	1.656	1.978
32	1.694	2.037		84	1.663	1.989		136	1.656	1.978
33	1.692	2.035		85	1.663	1.988		137	1.656	1.977
34	1.691	2.032		86	1.663	1.988		138	1.656	1.977
35	1.690	2.030		87	1.663	1.988		139	1.656	1.977
36	1.688	2.028		88	1.662	1.987		140	1.656	1.977
37	1.687	2.026		89	1.662	1.987		141	1.656	1.977
38	1.686	2.024		90	1.662	1.987		142	1.656	1.977
39	1.685	2.023		91	1.662	1.986		143	1.656	1.977
40	1.684	2.021		92	1.662	1.986		144	1.656	1.977
41	1.683	2.020		93	1.661	1.986		145	1.655	1.976
42	1.682	2.018		94	1.661	1.986		146	1.655	1.976
43	1.681	2.017		95	1.661	1.985		147	1.655	1.976
44	1.680	2.015		96	1.661	1.985		148	1.655	1.976
45	1.679	2.014		97	1.661	1.985		149	1.655	1.976
46	1.679	2.014		98	1.661	1.984		150	1.655	1.976
47	1.678	2.013		99	1.660	1.984		151	1.655	1.976
48	1.677	2.012		100	1.660	1.984		152	1.655	1.976

49	1.677	2.011		101	1.660	1.984		153	1.655	1.976
50	1.676	2.010		102	1.660	1.983		154	1.655	1.975
51	1.675	2.008		103	1.660	1.983		155	1.655	1.975
52	1.675	2.007		104	1.660	1.983		156	1.655	1.975

Lampiran 7: Tabel Distribusi Nilai F_{hitung}

α = 0,05	df_1=(k-1)							
df_2=(n	1	2	3	4	5	6	7	8
1	161.448	199,500	215.707	224,583	230,162	233.986	236,768	238,883
2	18,513	19,000	19,164	19,247	19,296	19,330	19,353	19,371
3	10,128	9,552	9,277	9,117	9,013	8,941	8,887	8,845
4	7,709	6,944	6,591	6,388	6,256	6,163	6,094	6,041
5	6,608	5,786	5,409	5,192	5,050	4,950	4,876	4,818
6	5,987	5,143	4,757	4,534	4,387	4,284	4,207	4,147
7	5,591	4,737	4,347	4,120	3,972	3,866	3,787	3,726
8	5,318	4,459	4,066	3,838	3,687	3,581	3,500	3,438
9	5,117	4,256	3,863	3,633	3,482	3,374	3,293	3,230
10	4,965	4,103	3,708	3,478	3,326	3,217	3,135	3,072
11	4,844	3,982	3,587	3,357	3,204	3,095	3,012	2,948
12	4,747	3,885	3,490	3,259	3,106	2,996	2,913	2,849
13	4,667	3,806	3,411	3,179	3,025	2,915	2,832	2,767
14	4,600	3,739	3,344	3,112	2,958	2,848	2,764	2,699
15	4,543	3,682	3,287	3,056	2,901	2,790	2,707	2,641
16	4,494	3,634	3,239	3,007	2,852	2,741	2,657	2,591
17	4,451	3,592	3,197	2,965	2,810	2,699	2,614	2,548
18	4,414	3,555	3,160	2,928	2,773	2,661	2,577	2,510
19	4,381	3,522	3,127	2,895	2,740	2,628	2,544	2,477
20	4,351	3,493	3,098	2,866	2,711	2,599	2,514	2,447
21	4,325	3,467	3,072	2,840	2,685	2,573	2,488	2,420
22	4,301	3,443	3,049	2,817	2,661	2,549	2,464	2,397
23	4,279	3,422	3,028	2,796	2,640	2,528	2,442	2,375
24	4,260	3,403	3,009	2,776	2,621	2,508	2,423	2,355
25	4,242	3,385	2,991	2,759	2,603	2,490	2,405	2,337
26	4,225	3,369	2,975	2,743	2,587	2,474	2,388	2,321

27	4,210	3,354	2,960	2,728	2,572	2,459	2,373	2,305
28	4,196	3,340	2,947	2,714	2,558	2,445	2,359	2,291
29	4,183	3,328	2,934	2,701	2,545	2,432	2,346	2,278
30	4,171	3,316	2,922	2,690	2,534	2,421	2,334	2,266
31	4,160	3,305	2,911	2,679	2,523	2,409	2,323	2,255
32	4,149	3,295	2,901	2,668	2,512	2,399	2,313	2,244
33	4,139	3,285	2,892	2,659	2,503	2,389	2,303	2,235
34	4,130	3,276	2,883	2,650	2,494	2,380	2,294	2,225
35	4,121	3,267	2,874	2,641	2,485	2,372	2,285	2,217
36	4,113	3,259	2,866	2,634	2,477	2,364	2,277	2,209
37	4,105	3,252	2,859	2,626	2,470	2,356	2,270	2,201
38	4,098	3,245	2,852	2,619	2,463	2,349	2,262	2,194
39	4,091	3,238	2,845	2,612	2,456	2,342	2,255	2,187
40	4,085	3,232	2,839	2,606	2,449	2,336	2,249	2,180
41	4,079	3,226	2,833	2,600	2,443	2,330	2,243	2,174
42	4,073	3,220	2,827	2,594	2,438	2,324	2,237	2,168
43	4,067	3,214	2,822	2,589	2,432	2,318	2,232	2,163
44	4,062	3,209	2,816	2,584	2,427	2,313	2,226	2,157
45	4,057	3,204	2,812	2,579	2,422	2,308	2,221	2,152
46	4,052	3,200	2,807	2,574	2,417	2,304	2,216	2,147
47	4,047	3,195	2,802	2,570	2,413	2,299	2,212	2,143
48	4,043	3,191	2,798	2,565	2,409	2,295	2,207	2,138
49	4,038	3,187	2,794	2,561	2,404	2,290	2,203	2,134
50	4,034	3,183	2,790	2,557	2,400	2,286	2,199	2,130
51	4,030	3,179	2,786	2,553	2,397	2,283	2,195	2,126
52	4,027	3,175	2,783	2,550	2,393	2,279	2,192	2,122
53	4,023	3,172	2,779	2,546	2,389	2,275	2,188	2,119
54	4,020	3,168	2,776	2,543	2,386	2,272	2,185	2,115
55	4,016	3,165	2,773	2,540	2,383	2,269	2,181	2,112

56	4,013	3,162	2,769	2,537	2,380	2,266	2,178	2,109
57	4,010	3,159	2,766	2,534	2,377	2,263	2,175	2,106
58	4,007	3,156	2,764	2,531	2,374	2,260	2,172	2,103
59	4,004	3,153	2,761	2,528	2,371	2,257	2,169	2,100
60	4,001	3,150	2,758	2,525	2,368	2,254	2,167	2,097
61	3,998	3,148	2,755	2,523	2,366	2,251	2,164	2,094
62	3,996	3,145	2,753	2,520	2,363	2,249	2,161	2,092
63	3,993	3,143	2,751	2,518	2,361	2,246	2,159	2,089
64	3,991	3,140	2,748	2,515	2,358	2,244	2,156	2,087
65	3,989	3,138	2,746	2,513	2,356	2,242	2,154	2,084
66	3,986	3,136	2,744	2,511	2,354	2,239	2,152	2,082
67	3,984	3,134	2,742	2,509	2,352	2,237	2,150	2,080
68	3,982	3,132	2,740	2,507	2,350	2,235	2,148	2,078
69	3,980	3,130	2,737	2,505	2,348	2,233	2,145	2,076
70	3,978	3,128	2,736	2,503	2,346	2,231	2,143	2,074
71	3,976	3,126	2,734	2,501	2,344	2,229	2,142	2,072
72	3,974	3,124	2,732	2,499	2,342	2,227	2,140	2,070
73	3,972	3,122	2,730	2,497	2,340	2,226	2,138	2,068
74	3,970	3,120	2,728	2,495	2,338	2,224	2,136	2,066
75	3,968	3,119	2,727	2,494	2,337	2,222	2,134	2,064
76	3,967	3,117	2,725	2,492	2,335	2,220	2,133	2,063
77	3,965	3,115	2,723	2,490	2,333	2,219	2,131	2,061
78	3,963	3,114	2,722	2,489	2,332	2,217	2,129	2,059
79	3,962	3,112	2,720	2,487	2,330	2,216	2,128	2,058
80	3,960	3,111	2,719	2,486	2,329	2,214	2,126	2,056
81	3,959	3,109	2,717	2,484	2,327	2,213	2,125	2,055
82	3,957	3,108	2,716	2,483	2,326	2,211	2,123	2,053
83	3,956	3,107	2,715	2,482	2,324	2,210	2,122	2,052
84	3,955	3,105	2,713	2,480	2,323	2,209	2,121	2,051

85	3,953	3,104	2,712	2,479	2,322	2,207	2,119	2,049
86	3,952	3,103	2,711	2,478	2,321	2,206	2,118	2,048
87	3,951	3,101	2,709	2,476	2,319	2,205	2,117	2,047
88	3,949	3,100	2,708	2,475	2,318	2,203	2,115	2,045
89	3,948	3,099	2,707	2,474	2,317	2,202	2,114	2,044
90	3,947	3,098	2,706	2,473	2,316	2,201	2,113	2,043
91	3,946	3,097	2,705	2,472	2,315	2,200	2,112	2,042
92	3,945	3,095	2,704	2,471	2,313	2,199	2,111	2,041
93	3,943	3,094	2,703	2,470	2,312	2,198	2,110	2,040
94	3,942	3,093	2,701	2,469	2,311	2,197	2,109	2,038
95	3,941	3,092	2,700	2,467	2,310	2,196	2,108	2,037
96	3,940	3,091	2,699	2,466	2,309	2,195	2,106	2,036
97	3,939	3,090	2,698	2,465	2,308	2,194	2,105	2,035
98	3,938	3,089	2,697	2,465	2,307	2,193	2,104	2,034
99	3,937	3,088	2,696	2,464	2,306	2,192	2,103	2,033
100	3,936	3,087	2,696	2,463	2,305	2,191	2,103	2,032